

KATA PENGANTAR

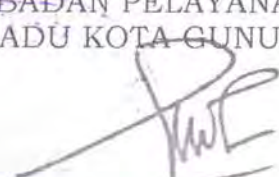
Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Gunungsitoli Tahun 2017 dalam rangka memenuhi amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Renja Tahun 2017 ini memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPPT Kota Gunungsitoli yang disusun dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Gunungsitoli Tahun 2017.

Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan Renja ini. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun akan senantiasa kami terima untuk perbaikan di masa mendatang. Namun demikian, kami berharap semoga Renja ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerja BPPT Kota Gunungsitoli khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat mendorong terwujudnya pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tercapainya visi Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli terpilih periode 2016-2021, yaitu "Kota Gunungsitoli yang Maju, Nyaman dan Berdaya Saing".

Gunungsitoli, April 2016

KEPALA ~~BADAN~~ PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU KOTA GUNUNGSITOLI,


MEI LINDA ROSTANTI LAROSA, ST

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19690531 199503 2 003

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv

Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gunungsitoli tentang Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gunungsitoli Tahun 2017	v
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penyajian	4
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2015	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	10
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	14
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat	17
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	18
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	18
3.2 Tujuan dan Sasaran SKPD	19
3.3 Indikator Kinerja, Strategi dan Kebijakan SKPD	20
3.4 Program dan Kegiatan	23
BAB IV : PENUTUP.....	24

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
2. Capaian Indikator Kinerja Pelayanan SKPD
3. Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat
4. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Lokasi, Pagu Indikatif dan Sumber Dana

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Struktur Organisasi BPPT Kota Gunungsitoli	12
------------------------------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Realisasi Program dan Kegiatan	6
Tabel 2. Realisasi Anggaran per Program	9
Tabel 3. Rekapitulasi PNS pada BPPT Kota Gunungsitoli	13
Tabel 4. Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat.....	14
Tabel 5. Indikator Kinerja BPPT Kota Gunungsitoli	19



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Pancasila No. 21 Telp/Fax (0639) 21686
GUNUNGSITOLI

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 503/404/BPPT/IV/2016

TENTANG

RENCANA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan program/kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gunungsitoli Tahun 2017, perlu menyusun Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gunungsitoli Tahun 2017 dengan mempedomani Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gunungsitoli tentang Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gunungsitoli Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 8. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
22. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gunungsitoli;
24. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gunungsitoli;

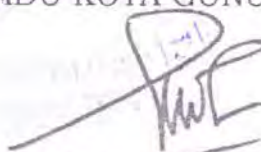
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gunungsitoli Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah dokumen perencanaan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gunungsitoli untuk periode 1 (satu) tahun.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Gunungsitoli, April 2016

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU KOTA GUNUNGSITOLI,



MEI LINDA ROSTANTI LAROSA, ST
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19690531 199503 2 003

Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Gunungsitoli
d.p. Bapak Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli.
2. Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli.
3. Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli.
4. Kepala Bagian I lingkup Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Sehingga salah satu tolok ukur keberhasilan otonomi daerah adalah kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik diharapkan akan memperbaiki citra pemerintah, karena dengan kualitas pelayanan publik yang semakin baik, kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan terwujud.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka berdasarkan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gunungsitoli dibentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Gunungsitoli sebagai unit penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Instansi Pemerintah Kota Gunungsitoli yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Selanjutnya, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja BPPT Kota Gunungsitoli Tahun 2017 ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerja BPPT Kota Gunungsitoli khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat mendorong terwujudnya pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tercapainya visi Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli terpilih periode 2016-2021, yaitu “Kota Gunungsitoli yang Maju, Nyaman dan Berdaya Saing”

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja BPPT Kota Gunungsitoli Tahun 2017, antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 8) Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
- 9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 10) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 11) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 15) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 20) Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- 21) Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
- 22) Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 23) Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gunungsitoli;
- 24) Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gunungsitoli.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja ini adalah sebagai dokumen perencanaan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Renja BPPT Kota Gunungsitoli Tahun 2017 ini disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- 1) Sebagai pedoman BPPT Kota Gunungsitoli dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2017.
- 2) Sebagai instrumen bagi setiap pegawai pada BPPT Kota Gunungsitoli dalam memahami arah kebijakan pada tahun 2017 untuk pencapaian tujuan organisasi.
- 3) Mewujudkan sinkronisasi penjabaran RKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2017.

1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Renja BPPT Kota Gunungsitoli Tahun 2017 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagai berikut :

1) Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4 Sistematika Penyajian

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

2) Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

3) Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3 Indikator Kinerja dan Strategi Renja SKPD

Perumusan indikator kinerja dan strategi didasarkan atas rumusan tujuan dan sasaran kinerja Renstra SKPD.

3.4 Program dan Kegiatan

Berisikan mengenai rencana program dan kegiatan, lokasi dan kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

4) Bab IV Penutup

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2015

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2015

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015

Untuk mencapai sasaran strategis, pada tahun 2015 BPPT Kota Gunungsitoli telah melaksanakan 7 (tujuh) program yang meliputi 34 (tiga puluh empat) kegiatan. Realisasi anggaran program dan kegiatan tersebut disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Realisasi Program dan Kegiatan

Sasaran : Terwujudnya pelayanan administrasi perizinan yang berkualitas				
Indikator Kinerja : Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang menunjang kelancaran penyelenggaraan pelayanan perizinan.				
Program I : Pelayanan Administrasi Perkantoran.				
No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000	4.110.500	91,34
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.000.000	119.099.679	85,07
3	Penyediaan Jasa Kebersihan	18.000.000	18.000.000	100
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	10.000.000	9.800.000	98,00
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	80.000.000	79.575.100	99,47
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58.160.000	57.784.800	99,35
7	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan	10.000.000	8.759.300	87,59
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	4.573.000	91,46
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	80.000.000	79.116.500	98,90
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	200.000.000	174.776.520	87,39
11	Monitoring/Survey/Pengawasan/ Evaluasi serta Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	115.000.000	97.875.000	85,11
12	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	92.940.000	92.580.000	99,61
13	Penyediaan Jasa Keamanan	18.000.000	18.000.000	100
14	Penyediaan Jasa Supir/Kernet/ Operator Alat Berat	20.400.000	20.400.000	100
15	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	36.000.000	36.000.000	100
16	Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor	5.000.000	4.709.000	94,18
TOTAL.....		893.000.000	825.159.399	92,40

Sasaran : Terpenuhi dan terpeliharanya sarana dan prasarana pelayanan perizinan.				
Indikator Kinerja : Tingkat pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan perizinan.				
Program II : Program Peningkatan Sarana dan Sarana Aparatur.				
No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Pengadaan Meubelair	20.000.000	18.750.000	93,75
2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.000.000	75.040.000	93,80
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	30.000.000	0	0
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	42.000.000	41.952.089	99,89
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	50.000.000	47.148.000	94,30
TOTAL.....		222.000.000	182.890.089	82,38

Sasaran : Meningkatnya disiplin aparatur pelayanan.				
Indikator Kinerja : Peningkatan disiplin aparatur.				
Program III : Program Peningkatan Disiplin Aparatur.				
No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	30.000.000	26.226.500	87,42
TOTAL.....		30.000.000	26.226.500	87,42

Sasaran : Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur pelayanan.				
Indikator Kinerja : Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.				
Program IV : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.				
No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Mengikuti Kegiatan Diklat/Bimtek/ Worskhop/ Kursus/Sosialisasi di Dalam dan Luar Daerah	100.000.000	98.897.600	98,90
TOTAL.....		100.000.000	98.897.600	98,90

Sasaran : Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi.				
Indikator Kinerja : Peningkatan promosi dan kerjasama investasi.				
Program V : Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.				
No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Penyusunan Data tentang Peluang Investasi di Daerah	45.000.000	0	0
TOTAL.....		45.000.000	0	0

Sasaran : - Optimalnya pembinaan penyelenggaraan pelayanan perizinan. - Terwujudnya koordinasi dan kerjasama yang baik antara BPPT Kota Gunungsitoli dengan SKPD terkait. - Terwujudnya pelayanan perizinan yang mudah, sederhana, cepat dan transparan.				
Indikator Kinerja : - Jumlah Kecamatan dalam rangka pelaksanaan pembinaan pelayanan perizinan kepada masyarakat. - Frekuensi pelaksanaan rapat koordinasi perizinan dan non perizinan dengan SKPD terkait - Jumlah peraturan/ketentuan di bidang pelayanan perizinan.				
Program VI : Program Pelayanan Perizinan				
No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Rapat Koordinasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	60.000.000	55.238.500	92,06
2	Fasilitas Rapat-Rapat Tim Teknis	50.000.000	49.950.600	99,90
3	Pelaksanaan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat	35.000.000	34.921.800	99,78
4	Pengurusan Perizinan secara langsung di Kecamatan	50.000.000	49.306.000	98,61
5	Pelaksanaan Pelayanan Pengaduan	30.000.000	29.933.250	99,78
6	Penyusunan Revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan	25.000.000	24.894.000	99,58
7	Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Masyarakat	100.000.000	97.673.500	97,67
TOTAL		350.000.000	341.917.650	97,69

Sasaran : Terwujudnya pelayanan perizinan yang efektif dan efisien.				
Indikator Kinerja : Peningkatan layanan informasi perizinan.				
Program VII : Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah				
No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Pencetakan Brosur-brosur tentang Perizinan dan Non Perizinan	25.000.000	24.700.000	98,80
2	Pembuatan Kalender Digital BPPT Kota Gunungsitoli	15.000.000	14.625.000	97,50
3	Pengembangan Aplikasi Sistem Manajemen kearsipan Perizinan	20.000.000	19.690.000	98,45
TOTAL		60.000.000	59.015.000	98,36

Tabel 2. Realisasi Anggaran per Program

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	16	893.000.000	825.159.399	92,40
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5	222.000.000	182.890.089	82,38
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	30.000.000	26.226.500	87,42
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	100.000.000	98.897.600	98,90
5	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1	45.000.000	0	0
6	Program Pelayanan Perizinan	7	350.000.000	341.917.650	97,69
7	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	3	60.000.000	59.015.000	98,36
Jumlah Keseluruhan.....		34	1.700.000.000	1.534.106.238	90,24

Total anggaran yang dikelola BPPT Kota Gunungsitoli pada Tahun Anggaran 2015 sebesar **Rp.1.700.000.000,-** (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) dan yang terealisasi adalah sebesar **Rp.1.534.106.238,-** (satu miliar lima ratus tiga puluh empat juta seratus enam ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah). Maka pencapaian kinerja BPPT Kota Gunungsitoli berdasarkan realisasi anggaran adalah :

$$\text{Realisasi Anggaran} = \frac{1.700.000.000}{1.534.106.238} \times 100\% = \mathbf{90,24\%}$$

Berdasarkan persentase realisasi anggaran, yakni sebesar **90,24%** dan sisa anggaran yang belum terealisasi sebesar **Rp.165.893.762,-** (seratus enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) atau **9,76%**.

Adapun program/kegiatan pada BPPT Kota Gunungsitoli tahun 2015 yang tidak terlaksana, sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yaitu kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Kegiatan dimaksud direncanakan dilaksanakan pada awal triwulan II tahun 2015, namun surat perpanjangan pinjam pakai gedung dari Pemerintah Kabupaten Nias baru diterima pada bulan Juni 2015. Adapun keputusan penetapan status penggunaan bangunan milik daerah Pemerintah Kabupaten Nias pada BPPT Kota Gunungsitoli baru diterbitkan pada bulan Oktober 2015. Selanjutnya pada pertengahan tahun 2015 juga terjadi kenaikan harga barang/bahan konstruksi yang signifikan, sehingga kegiatan dimaksud tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Sisa anggaran tersebut mengendap di Kas Umum Daerah.

- 2) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, yaitu kegiatan Penyusunan Data tentang Peluang Investasi di Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan karena hingga akhir tahun 2015 urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal belum didelegasikan kepada BPPT Kota Gunungsitoli. Sisa anggaran tersebut mengendap di Kas Umum Daerah

2.1.2 Pencapaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Berdasarkan Renstra SKPD

Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2015 serta perkiraan capaian pelaksanaan sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada Lampiran 1.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

2.2.1 Unsur-Unsur Penting Dalam Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

A) Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi dan tata kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gunungsitoli, maka kedudukan, tugas dan fungsi BPPT Kota Gunungsitoli adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

BPPT Kota Gunungsitoli dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Gunungsitoli.

2. Tugas Pokok

BPPT Kota Gunungsitoli diberikan tugas pokok, yaitu melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, BPPT Kota Gunungsitoli menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan terpadu.
- 2) Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan Walikota.
- 3) Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian badan.
- 4) Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu.

B) Aspek Strategis

Sejalan dengan pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Gunungsitoli, ditetapkan fokus utama prioritas pembangunan sebagai berikut :

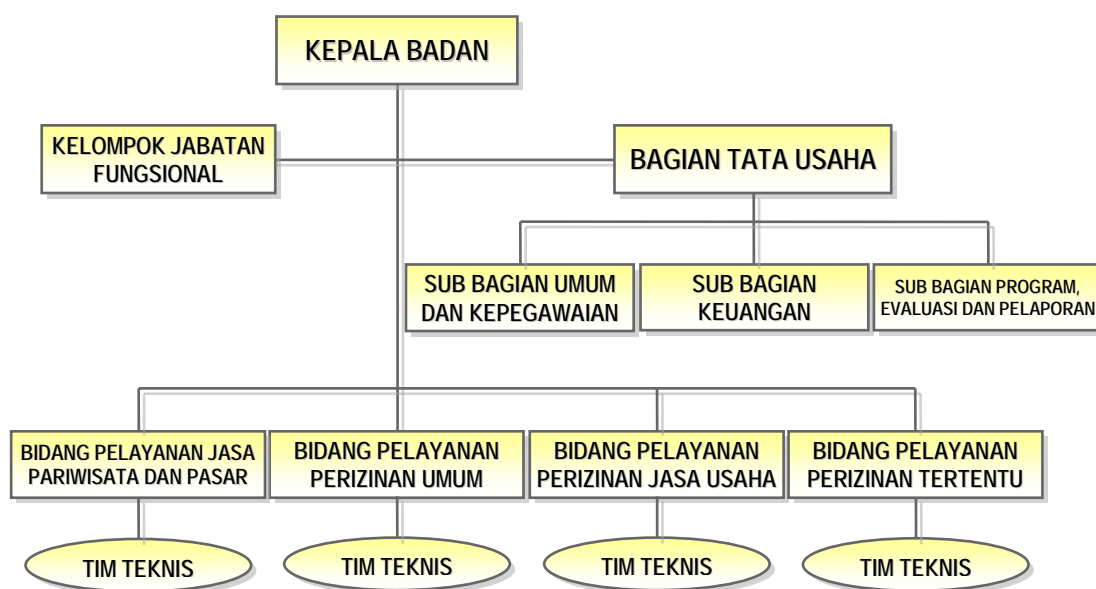
1. Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Pengembangan infrastruktur strategis berbasis kewilayahan.
3. Pengembangan pendidikan berkualitas dan pelestarian nilai-nilai kearifan lokal.
4. Peningkatan derajat kesehatan dan perlindungan sosial bagi masyarakat.
5. Pengembangan perekonomian daerah berbasis perdagangan, jasa dan industri.

Prioritas pembangunan yang terkait tugas dan fungsi BPPT Kota Gunungsitoli adalah prioritas pertama, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

C) Kelembagaan

1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi BPPT Kota Gunungsitoli sesuai dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2009 sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi BPPT Kota Gunungsitoli

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala BPPT Kota Gunungsitoli dibantu oleh :

- 1) Kepala Bagian Tata Usaha, dengan tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan urusan umum, perencanaan program, pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan. Kepala Bagian Tatas Usaha membawahi 3 (tiga) Kepala Sub bagian, antara lain :
 - a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian, dengan tugas pokok melaksanakan urusan umum dan pengelola administrasi kepegawaian.
 - b. Kasubbag Keuangan, dengan tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
 - c. Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan, dengan tugas pokok melaksanakan tugas yang berhubungan dengan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu.
- 3) Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Jasa Pariwisata dan Pasar, dengan tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Badan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang jasa pariwisata dan pasar.

- 4) Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Umum, dengan tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Badan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pelayanan Perizinan di bidang perizinan umum.
- 5) Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha, dengan tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Badan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pelayanan Perizinan di bidang perizinan jasa usaha.
- 6) Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu, dengan tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Badan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pelayanan Perizinan di bidang perizinan tertentu.
- 7) Tim Teknis.
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, BPPT Kota Gunungsitoli didukung oleh sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 26 (dua puluh enam) yang bervariasi, baik berdasarkan tingkat pendidikan, golongan maupun eselon. Rekapitulasi PNS pada BPPT Kota Gunungsitoli dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. Rekapitulasi PNS pada BPPT Kota Gunungsitoli berdasarkan Jabatan, Pendidikan, Golongan dan Eselon

No.	Jabatan	Jumlah	Pendidikan				Golongan			Eselon			
			S2	S1	D3	SLTA	IV	III	II	II	III	IV	Non
1	2	3	4				5			6			
1	Kepala Badan	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
2	Kabag Tata Usaha	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
3	Kepala Bidang	4	-	3	-	1	2	2	-	-	4	-	-
4	Kasubbag	3	-	1	-	2	-	3	-	-	-	2	1
5	Staf	21	1	10	4	6	1	11	9	-	-	-	21
Jumlah Keseluruhan		30	2	15	4	9	5	16	9	1	5	2	22
			30				30			30			

3. Sarana dan Prasarana

Tabel 4. Sarana dan Prasarana pada BPPT Kota Gunungsitoli

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tahan dan Bangunan	1 Bidang	Status pinjam pakai dari Pemerintah Kabupaten Nias
2	Mobil Operasional	1 Unit	
3	Motor Operasional	4 Unit	
4	Komputer Desktop	4 Unit	
5	Komputer Server	2 Unit	
6	Laptop	5 Unit	
7	Notebook	7 Unit	
8	Printer	13 Unit	
9	AC	3 Unit	
10	Kipas Angin	8 Unit	
11	Televisi	1 Unit	
12	Digital Parabola	1 Unit	
13	Stabilisator	2 Unit	
14	UPS Server	1 Unit	
15	UPS PC	4 Unit	
16	Camera	6 Unit	
17	Handycam	1 Unit	
18	Meja Kerja	28 Unit	
19	Meja Rapat	1 Unit	
20	Meja Pelayanan	1 Set	
21	Kursi Kerja	45 Unit	
22	Kursi Rapat	36 Unit	
23	Kursi Tamu	2 Set	
24	Kursi Pemohon	3 Unit	
25	Rak Buku	3 Unit	
26	Lemari Tertutup	4 Unit	
27	Lemari Arsip	8 Unit	
28	Filling Cabinet	11 Unit	
29	Brankas	2 Unit	
30	Telepon/Faximili	1 Unit	
31	Proyektor/Infocus	1 Unit	
32	Generating Set	1 Unit	
33	GPS	1 Unit	
34	Papan Pengumuman	4 Unit	
35	Alat Penghancur Kertas	2 Unit	
36	Alat Pemotong Kertas	1 Unit	
37	Sound System	1 Unit	
38	PC Sistem Antrian	1 Unit	
39	Jaringan Komputer	1 Unit	
40	Jaringan Internet	1 Unit	

2.2.2 Analisis Capaian Indikator Kinerja Pelayanan SKPD

Adapun capaian indikator kinerja pelayanan pada BPPT Kota Gunungsitoli berdasarkan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di Kota Gunungsitoli kurun waktu tahun 2011 s.d 2015 disajikan pada Lampiran 2.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai penyelenggara pelayanan administrasi perizinan, BPPT Kota Gunungsitoli tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi, antara lain :

- 1) Terbatasnya kapasitas sumber daya aparatur.
- 2) Dari 59 jenis perizinan pada BPPT Kota Gunungsitoli, masih 3 (tiga) jenis perizinan yang sudah diatur dalam regulasi/produk hukum Pemerintah Kota Gunungsitoli, yaitu :
 - a. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang diatur dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
 - b. Izin Gangguan yang diatur dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 13 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Gangguan.
 - c. Izin Tempat Usaha Fasilitas Pasar yang diatur dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 24 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.Sehingga untuk jenis perizinan yang belum diatur dalam regulasi/produk hukum Pemerintah Kota Gunungsitoli, maka pemberian izin beserta penetapan persyaratannya berpedoman kepada Peraturan Menteri yang bersesuaian dan peraturan perundang-undangan di atas Peraturan Daerah.
- 3) Belum optimalnya koordinasi BPPT Kota Gunungsitoli dengan SKPD terkait dan hingga saat ini Tim Teknis masih belum ditempatkan di BPPT Kota Gunungsitoli, tetapi masih berkantor pada SKPD asal.

Sebagai tindak lanjut kendala tersebut, BPPT Kota Gunungsitoli menetapkan langkah-langkah antisipatif, antara lain :

- 1) Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur.
- 2) Mendorong SKPD Teknis lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui Walikota Gunungsitoli untuk melakukan percepatan penyusunan regulasi mengenai perizinan yang telah didelegasikan kewenangan penyelenggaraannya kepada BPPT Kota Gunungsitoli.
- 3) Membangun dan meningkatkan koordinasi antara BPPT Kota Gunungsitoli dengan SKPD terkait melalui rapat koordinasi dengan SKPD terkait dan konsolidasi dengan Tim Teknis.

Adapun beberapa hal yang telah dilakukan BPPT Kota Gunungsitoli untuk meningkatkan kinerja pelayanan, antara lain :

- 1) Menyusun draft Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 503/186/K/2012 tanggal 4 Juni 2012 tentang Mekanisme Pelayanan Perizinan pada BPPT Kota Gunungsitoli.
- 2) Menetapkan Keputusan Kepala BPPT Kota Gunungsitoli Nomor 503/678/BPPT/2012 tanggal 25 Juli 2012 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada BPPT Kota Gunungsitoli.
- 3) Menyusun draft Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 503-429 Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan pada BPPT Kota Gunungsitoli.
- 4) Menetapkan Keputusan Kepala BPPT Kota Gunungsitoli Nomor 503/064.a/BPPT/I/2014 tanggal 27 Januari 2014 tentang Mekanisme dan Alur Pelayanan Pengaduan pada BPPT Kota Gunungsitoli.
- 5) Menyusun draft Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 16 Tahun 2014 tanggal 18 Juni 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli kepada BPPT Kota Gunungsitoli.
- 6) Menetapkan Keputusan Kepala BPPT Kota Gunungsitoli Nomor 503/1027/BPPT/XI/2014 tanggal 16 November 2014 tentang Standar Pelayanan (SP) pada BPPT Kota Gunungsitoli.
- 7) Menetapkan dan mengekspose Maklumat Pelayanan pada BPPT Kota Gunungsitoli tanggal 27 November 2014.
- 8) Menyusun draft Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 503-171 Tahun 2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 503-429 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan pada BPPT Kota Gunungsitoli.

- 9) Melaksanakan rapat koordinasi perizinan dengan SKPD terkait dan Tim Teknis secara berkala dan berkelanjutan.
- 10) Mendorong SKPD Teknis lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui Walikota Gunungsitoli untuk melakukan percepatan penyusunan regulasi mengenai perizinan yang telah didelegasikan kewenangan penyelenggaraannya kepada BPPT Kota Gunungsitoli.
- 11) Menyelenggarakan pelayanan pengaduan pada BPPT Kota Gunungsitoli.
- 12) Melakukan sosialisasi perizinan kepada masyarakat di setiap Kecamatan secara berkala.
- 13) Melakukan monitoring pelaksanaan perizinan di setiap Kecamatan secara berkala.
- 14) Melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk mengetahui tingkat kinerja BPPT Kota Gunungsitoli terhadap pelayanan publik secara berkala.
- 15) Melaksanakan pengembangan aplikasi pelayanan perizinan pada BPPT Kota Gunungsitoli.
- 16) Meningkatkan pelayanan informasi dan promosi perizinan melalui brosur, spanduk/baliho, website dan media elektronik (radio).

Selanjutnya, dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2015, ada beberapa kendala yang dihadapi BPPT Kota Gunungsitoli, antara lain :

- 1) Terbatasnya kapasitas sumber daya aparatur.
- 2) Belum optimalnya kerjasama sumber daya aparatur.

Untuk itu, BPPT Kota Gunungsitoli menetapkan langkah-langkah antisipatif untuk mengatasi kendala pada tahun mendatang, antara lain:

- 1) Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur.
- 2) Memantapkan komitmen dan meningkatkan kerjasama sumber daya aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta dalam mendukung terlaksananya program dan kegiatan.

2.4 PENELAHAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI MASYARAKAT

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Adapun usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang diperoleh berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dapat dilihat pada Lampiran 3.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, salah satu arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 adalah “penyiapan landasan pembangunan yang kokoh” yang dicirikan dengan peningkatan pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien.

Selanjutnya dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Gunungsitoli Tahun 2017, salah satu prioritas pembangunan daerah Kota Gunungsitoli adalah “pengembangan kualitas pelayanan publik yang didukung dengan sumber daya aparatur daerah yang memiliki etos kerja dan kapabilitas dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik”.

Merujuk kepada hal tersebut, maka BPPT Kota Gunungsitoli yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gunungsitoli mempunyai kedudukan dan peran strategis sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Instansi Pemerintah Kota Gunungsitoli dengan tugas pokoknya yaitu “melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian”.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN SKPD

3.2.1 Tujuan

Tujuan menggambarkan hasil-hasil yang ingin dicapai oleh SKPD. Tujuan harus konsisten dengan tugas dan fungsinya serta searah dengan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan.

BPPT Kota Gunungsitoli menetapkan tujuan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia pelayanan perizinan terpadu.
- 2) Peningkatan koordinasi antara BPPT Kota Gunungsitoli dengan SKPD terkait dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.
- 3) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perizinan dan mengoptimalkan pembinaan penyelenggaraan pelayanan perizinan.

- 4) Penyederhanaan prosedur dan standarisasi Pelayanan Perizinan untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang mudah, sederhana, cepat dan transparan.
- 5) Pengembangan sistem informasi Pelayanan yang berbasis teknologi, informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien.
- 6) Peningkatan pemantauan dan evaluasi dalam proses pemberian Pelayanan Perizinan.

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan dan merupakan gambaran dari hasil yang ingin dicapai suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

BPPT Kota Gunungsitoli menetapkan sasaran berdasarkan tujuannya, yaitu :

- 1) Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pelayanan.
- 2) Terwujudnya koordinasi dan kerjasama yang baik antara BPPT Kota Gunungsitoli dengan SKPD teknis terkait.
- 3) Terwujudnya pelayanan administrasi perizinan yang berkualitas dan optimalnya pembinaan penyelenggaraan pelayanan perizinan.
- 4) Terwujudnya pelayanan perizinan yang cepat, mudah dan sederhana.
- 5) Terwujudnya pelayanan perizinan yang efektif dan efisien.
- 6) Meningkatnya pemantauan dan evaluasi dalam proses pemberian pelayanan perizinan.

3.3 INDIKATOR KINERJA, STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

3.3.1 Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan tolok ukur keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis suatu organisasi. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka indikator kinerja BPPT Kota Gunungsitoli adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Indikator Kinerja BPPT Kota Gunungsitoli

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia pelayanan perizinan terpadu.	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pelayanan.	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dengan indikator kinerja : - Jumlah aparatur PNS yang mengikuti kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas.

2	Peningkatan koordinasi BPPT Kota Gunungsitoli dengan SKPD teknis terkait dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.	Terwujudnya koordinasi dan kerjasama yang baik antara Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gunungsitoli dengan SKPD terkait.	Persentase peningkatan koordinasi perizinan dan non perizinan dengan SKPD terkait, dengan indikator kinerja : - Frekuensi pelaksanaan rapat koordinasi perizinan dan non perizinan dengan SKPD terkait.
3.	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perizinan dan mengoptimalkan pembinaan penyelenggaraan pelayanan perizinan.	Terwujudnya pelayanan administrasi perizinan yang berkualitas dan optimalnya pembinaan penyelenggaraan pelayanan perizinan.	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi perizinan, dengan indikator kinerja : - Jumlah dokumen Izin yang diterbitkan. - Jumlah jenis perizinan yang didelegasikan kepada BPPT Kota Gunungsitoli. - Jumlah Kecamatan dalam rangka pelaksanaan pembinaan pelayanan perizinan kepada masyarakat.
4	Penyederhanaan prosedur dan standarisasi Pelayanan Perizinan untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang mudah, sederhana, cepat dan transparan.	Terwujudnya pelayanan perizinan yang mudah, sederhana, cepat dan transparan.	Persentase peningkatan kualitas pelayanan perizinan, dengan indikator kinerja : - Jumlah peraturan/ketentuan di bidang pelayanan perizinan. - Jumlah Kecamatan dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan secara langsung.
5	Pengembangan sistem informasi Pelayanan yang berbasis teknologi, informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien.	Terwujudnya pelayanan perizinan yang efektif dan efisien.	Persentase peningkatan sistem informasi pelayanan perizinan, dengan indikator kinerja : - Jumlah jenis aplikasi pelayanan perizinan. - Jumlah jenis media publikasi layanan perizinan.
6	Peningkatan pemantauan dan evaluasi dalam proses pemberian pelayanan perizinan.	Meningkatnya pemantauan dan evaluasi dalam proses pemberian pelayanan perizinan.	Persentase peningkatan pemantauan dan evaluasi atas pemberian pelayanan perizinan, dengan indikator kinerja : - Jumlah dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi perizinan. - Jumlah dokumen laporan hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) .

3.3.2 Strategi

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan maka diperlukan strategi sebagai suatu tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan selama 5 (lima) tahun. Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana

tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Untuk mencapai kinerja pelayanan, BPPT Kota Gunungsitoli menetapkan beberapa strategi yang akan ditempuh, sebagai berikut :

- 1) Peningkatan peran kelembagaan yang didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan berkompeten di bidangnya.
- 2) Pembentukan komitmen dan konsistensi aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.
- 3) Peningkatan koordinasi antara Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gunungsitoli dengan SKPD terkait.
- 4) Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, tepat, mudah, transparan dan terjangkau.
- 5) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam mendukung penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- 6) Peningkatan pelaksanaan sosialisasi pelayanan perizinan kepada masyarakat.
- 7) Pemberian kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- 8) Penyederhanaan prosedur dan standarisasi pelayanan perizinan.
- 9) Pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan yang berbasis teknologi, informasi dan komunikasi.
- 10) Peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk mengukur kinerja pelayanan dan indeks kepuasan masyarakat.

3.3.3 Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Arah kebijakan BPPT Kota Gunungsitoli antara lain :

- 1) Mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat.
- 2) Meningkatkan fungsi koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.
- 3) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP).

- 4) Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendorong keberhasilan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.
- 5) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 6) Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan PTSP dan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan sebagai upaya membangun pemahaman yang optimal.
- 7) Membangun komitmen dan konsistensi seluruh aparatur pelayanan terhadap peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dalam menciptakan iklim usaha/investasi yang kondusif.
- 8) Mengembangkan dan meningkatkan data dan sistem informasi pelayanan perizinan melalui pemanfaatan Teknologi informasi dan telekomunikasi.
- 9) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan dan penyelenggaran Pelayanan Perizinan.
- 10) Mengikuti pelaksanaan Diklat, Bimtek, Lokakarya, Workshop, Sosialisasi dan kegiatan sejenis lainnya.
- 11) Mengoptimalkan peran dan fungsi Tim Teknis.

3.4 PROGRAM DAN KEGIATAN

Ada 6 (enam) program yang terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) kegiatan yang akan dilaksanakan BPPT Kota Gunungsitoli pada tahun 2017, sebagai berikut :

- I) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan :
 1. Penyediaan jasa surat menyurat.
 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
 3. Pemeliharaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
 5. Penyediaan alat tulis kantor.
 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
 9. Penyediaan makanan dan minuman.
 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
 11. Monitoring/Survey/Pengawasan/Evaluasi Serta Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.
 12. Penyediaan Jasa Administrasi Umum.
 13. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor.

14. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor.
 15. Penyediaan Jasa Supir/Kernet/Operator Alat Berat.
 16. Penyediaan peralatan kebersihan kantor.
- II) Program Peningkatan Sarana dan Sarana Aparatur, meliputi kegiatan :
1. Pengadaan meubelair.
 2. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.
 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
 4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
- III) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, meliputi kegiatan :
1. Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH).
- IV) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, meliputi kegiatan :
1. Mengikuti Kegiatan Diklat/Bimtek/Workshop/Kursus/Sosialisasi di Dalam dan Luar Daerah.
- V) Program Pelayanan Perizinan, meliputi kegiatan :
1. Publikasi Layanan Perizinan Melalui Media Elektronik.
 2. Rapat Koordinasi Pelayanan Perizinan.
 3. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
 4. Sosialisasi Pelayanan Perizinan.
 5. Penyusunan revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan.
 6. Pelayanan perizinan secara langsung di Kecamatan.
 7. Penanganan Pengaduan Perizinan.
 8. Pembentukan Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.
- VI) Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah, meliputi kegiatan :
1. Pembuatan brosur perizinan.
 2. Pembuatan kalender perizinan.
 3. Pengembangan website.

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, lokasi, pagu indikatif dan perkiraan maju rencana tahun 2018 dapat dilihat pada Lampiran 4. Selanjutnya rencana program, kegiatan, indikator kinerja, lokasi, pagu indikatif dan sumber dana untuk tahun 2017 dapat dilihat pada Lampiran 4.a.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja BPPT Kota Gunungsitoli Tahun 2017 ini disusun dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Gunungsitoli Tahun 2017.

Renja ini digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPPT Kota Gunungsitoli dan instrumen bagi setiap pegawai pada BPPT Kota Gunungsitoli dalam memahami arah kebijakan dan tujuan organisasi pada tahun 2017.

Akhirnya, kami berharap semoga Renja ini dapat memberikan gambaran terhadap rencana kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh BPPT Kota Gunungsitoli pada tahun 2017 serta dapat memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan kinerja yang lebih baik pada tahun berikutnya yang disertai dengan semakin meningkatnya dukungan dari Walikota Gunungsitoli, Wakil Walikota Gunungsitoli, DPRD Kota Gunungsitoli dan seluruh stakeholder sehingga dapat mendorong terwujudnya pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tercapainya visi Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli terpilih periode 2016-2021, yaitu “Kota Gunungsitoli yang Maju, Nyaman dan Berdaya Saing”.

Gunungsitoli, April 2016

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU KOTA GUNUNGSITOLI,


MEI LINDA ROSTANTI LAROSA, ST
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19690531 199503 2 003

LAMPIRAN - LAMPIRAN

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN SKPD
BERDASARKAN RENSTRA SKPD S.D TAHUN 2015
DAN PERKIRAAN REALISASI PELAKSANAAN S.D TAHUN 2016**

SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gunungsitoli

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2016 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015			Realisasi Renstra Hingga Tahun 2015	Capaian Realisasi Hingga Tahun 2015 (%)	Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2016)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2016		Ket.		
					Target Renja SKPD Tahun 2015	Realisasi Renja SKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9 = 5+7	10 = 9/4	11	12 = 9 + 11	13 = 12/4	14		
1	20		Otda, Pem. Umum, Adm. Keuda, Prkt Daerah, Kepeg. dan Persandian												
1	20	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran											
1	20	01	01	Penyediaan Jasa surat menyurat	Tersedianya materi, peranko dan benda pos lainnya	6 Tahun	4 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	5 Tahun	83	1 Tahun	6 Tahun	100
1	20	01	02	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor (ATK)	6 Tahun	4 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	4 Tahun	83	1 Tahun	6 Tahun	100
1	20	01	03	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	6 Tahun	4 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	4 Tahun	83	1 Tahun	6 Tahun	100
1	20	01	04	Penyediaan komponen-komponen instalasi, listrik penerangan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik penerangan kantor	6 Tahun	4 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	4 Tahun	83	1 Tahun	6 Tahun	100
1	20	01	05	Penyediaan bahan-bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya biaya bahan bacaan surat kabar	6 Tahun	4 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	4 Tahun	83	1 Tahun	6 Tahun	100
1	20	01	06	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman Pegawai	6 Tahun	4 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	4 Tahun	83	1 Tahun	6 Tahun	100
1	20	01	07	Belanja rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	6 Tahun	4 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	4 Tahun	83	1 Tahun	6 Tahun	100
1	20	01	08	Monitoring/Survey/Pengawasan/evaluasi serta rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	6 Tahun	4 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	4 Tahun	83	1 Tahun	6 Tahun	100
1	20	01	09	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya biaya rekening listrik, telepon dan air	6 Tahun	4 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	4 Tahun	83	1 Tahun	6 Tahun	100
1	20	01	10	Penyediaan jasa administrasi umum/keuangan	Tersedianya honorarium pengelola administrasi umum/keuangan	6 Tahun	4 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	4 Tahun	83	1 Tahun	6 Tahun	100
1	20	01	11	Penyediaan peralatan kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	5 Tahun	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	4 Tahun	80	1 Tahun	5 Tahun	100
1	20	01	12	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja dengan baik	4 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	3 Tahun	75	1 Tahun	4 Tahun	100
1	20	01	13	Penyediaan jasa jaringan Internet	Lancarnya penyediaan informasi yang dibutuhkan	4 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	3 Tahun	75	1 Tahun	4 Tahun	100
1	20	01	14	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya upah tenaga petugas kebersihan	-	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	3 Tahun	300	1 Tahun	4 Tahun	400
1	20	01	15	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya upah tenaga petugas jaga malam	-	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	3 Tahun	300	1 Tahun	4 Tahun	400
1	20	01	16	Penyediaan Jasa Supir/Kernet/Operator Alat Berat	Tersedianya upah tenaga supir	-	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	3 Tahun	300	1 Tahun	4 Tahun	400
1	20	01	17	Penyediaan Jasa Administrasi kantor	Tersedianya upah tenaga administrasi kantor	-	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	2 Tahun	200	1 Tahun	3 Tahun	300

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2016 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015			Realisasi Renstra Hingga Tahun 2015	Capaian Realisasi Hingga Tahun 2015 (%)	Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2016)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2016		Ket.		
					Target Renja SKPD Tahun 2015	Realisasi Renja SKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9 = 5+7	10 = 9/4	11	12 = 9 + 11	13 = 12/4	14		
1	20	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhi dan terpeliharanya sarana dan prasarana pelayanan perizinan											
1	20	02	01	Pengadaan Meubelair	Tersedianya meubelair kantor	5 Tahun	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	4 Tahun	80	1 Tahun	5 Tahun	100
1	20	02	02	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	6 Tahun	4 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	5 Tahun	83	1 Tahun	6 Tahun	100
1	20	02	03	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor dengan baik	6 Tahun	4 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	5 Tahun	83	1 Tahun	6 Tahun	100
1	20	02	04	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik	4 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	3 Tahun	75	1 Tahun	4 Tahun	100
1	20	02	05	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor dengan baik	6 Tahun	4 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	5 Tahun	83	1 Tahun	6 Tahun	100
1	20	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur											
1	20	03	01	Pengadaan Pakaian/Seragam Khusus Perizinan	Tersedianya Pakaian Khusus Perizinan	4 Paket	2 Paket	-	-	-	2 Paket	50	1 Paket	3 Paket	75
1	20	03	02	Pemberian insentif pegawai	Tersedianya biaya insentif Pegawai	4 Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	20	03	03	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	2 Paket	-	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	50	-	1 Paket	50
1	20	03	04	Pengadaan Pakaian/Seragam Olahraga	Tersedianya Pakaian Olahraga	4 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	20	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pelayanan											
1	20	05	01	Mengikuti kegiatan Diklat/Bimtek/Workshop/Kursus/ Sosialisasi	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pelayanan	6 Tahun	4 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	5 Tahun	83	1 Tahun	6 Tahun	100
1	20	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya kualitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											
1	20	06	01	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Tersusunnya laporan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	4 Tahun	4 Tahun	-	1 Tahun	100	5 Tahun	125	-	6 Tahun	150
1	20	06	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semester dan Tahunan	Tersusunnya Laporan Keuangan Semester dan Tahunan	4 Tahun	4 Tahun	-	1 Tahun	100	5 Tahun	125	-	6 Tahun	150
1	20	06	03	Penyusunan Rencana Strategis 5 (lima) Tahun mendatang	Tersusunnya Renstra SKPD Tahun 2016	2 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	50	1 Dokumen	2 Dokumen	100
1	20	06	04	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Tersusunnya RKA BPPT Kota Gunungsitoli	4 Dokumen	4 Dokumen	-	1 Dokumen	100	5 Dokumen	125	-	6 Dokumen	150
1	20	06	05	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD	Tersusunnya LAKIP BPPT dengan baik	4 Dokumen	4 Dokumen	-	1 Dokumen	100	5 Dokumen	125	-	6 Dokumen	150
1	20	32	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	Adanya Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah											
1	20	32	01	Pencetakan brosur-brosur tentang Perizinan dan Non Perizinan	Meningkatnya informasi kepada masyarakat tentang pelayanan perizinan	5 Paket	4 Paket	1 Paket	1 Paket	100	5 Paket	100	-	5 Paket	100
1	20	32	02	Pembuatan kalender perizinan	Tersedianya kalender perizinan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	2 Paket	50	-	2 Paket	50
1	20	32	03	Pengembangan Website BPPT Kota Gunungsitoli	Meningkatnya informasi pelayanan perizinan melalui Website BPPT Kota Gunungsitoli	4 paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100	2 Paket	50	-	2 Paket	50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2016 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015			Realisasi Renstra Hingga Tahun 2015	Capaian Realisasi Hingga Tahun 2015 (%)	Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2016)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2016		Ket.			
					Target Renja SKPD Tahun 2015	Realisasi Renja SKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra				
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9 = 5+7	10 = 9/4	11	12 = 9 + 11	13 = 12/4	14			
1	20	32	04	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Perizinan	Adanya pengembangan aplikasi/database sistem informasi pelayanan perizinan	4 Paket	3 Paket	-	-	-	3 Paket	75	-	3 Paket	75	
1	20	32	05	Pengembangan Aplikasi Sistem Manajemen Kearsipan Perizinan	Adanya pengembangan sistem manajemen kearsipan perizinan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	2 Paket	50	0	2 Paket	50	
1				WAJIB												
1	20			Olda, Pem. Umum, Adm. Keuda, Prkt Daerah, Kepeg. dan Persandian												
1	20	31		Program Pelayanan Perizinan	Meningkatnya pelayanan perizinan yang mudah, sederhana, cepat dan transparan	110 Jenis Perizinan	27 Jenis Perizinan	27 Jenis Perizinan	32 Jenis Perizinan	119	59	54	-	59 Jenis Perizinan	54	
1	20	31	01	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan	Tersusunnya SOP Pelayanan Perizinan	4 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	3 Dokumen	75	-	3 Dokumen	75	
1	20	31	02	Penyusunan Standar Pelayanan (SP)	Tersusunnya Standar Pelayanan (SP)	2 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	50	1 Dokumen	2 Dokumen	100	
1	20	31	03	Publikasi Pelayanan Perizinan melalui media elektronik	Meningkatnya informasi pelayanan perizinan kepada masyarakat melalui media elektronik	5 Paket	2 Paket	-	-	-	2 Paket	40	1 Paket	3 Paket	60	
1	20	31	04	Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada masyarakat	Terselenggaranya Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Masyarakat	4 x 6 Kecamatan	3 x 6 Kecamatan	1 x 6 Kecamatan	1 x 6 Kecamatan	100	4 x 6 Kec.	100	1 x 6 Kecamatan	5 x 6 Kecamatan	125	
1	20	31	05	Rapat koordinasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Terlaksananya rapat koordinasi di Bidang Perizinan dan Non Perizinan dengan SKPD Terkait	4 Kali	10 Kali	1 Kali	2 Kali	100	12 Kali	300	1 Kali	13 Kali	325	
1	20	31	06	Fasilitasi rapat-rapat Tim Teknis	Terlaksananya rapat-rapat Tim Teknis	4 Tahun	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	4 Tahun	100	-	4 Tahun	100	
1	20	31	07	Pelaksanaan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tersusunnya Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	6 Dokumen	150	2 Dokumen	8 Dokumen	200	
1	20	31	08	Pengurusan Perizinan secara langsung di Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Perizinan secara langsung di Kecamatan	8 Kecamatan	3 Kecamatan	3 Kecamatan	4 Kecamatan	133	7 Kec.	88	4 Kecamatan	11 Kecamatan	138	
1	20	31	09	Pelaksanaan Pelayanan Pengaduan	Terlaksananya pengelolaan pengaduan masyarakat	4 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	3 Tahun	75	1 Tahun	4 Tahun	100	

Gunungsitoli, April 2016

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU KOTA GUNUNGSITOLI,



MEI LINDA ROSTANTI LAROSA, ST
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19690531 199503 2 003

Lampiran 2.

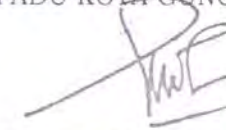
**Capaian Indikator Kinerja SKPD s.d. Tahun 2015
Dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Kinerja s.d. Tahun 2016
Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gunungsitoli**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tupoksi SKPD	SPM/ Standar Nasional	IKK (PP 6/2008)	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian					Capaian s.d 2015 (%)	Proyeksi 2016	Proyeksi Capaian s.d 2016 (%)	Catatan Analisis
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Jumlah dokumen izin yang diterbitkan			1.400 Dok. Izin	1.450 Dok. Izin	1.500 Dok. Izin	1.550 Dok. Izin	1.600 Dok. Izin	1.650 Dok. Izin	2.993 Dok. Izin	2.569 Dok. Izin	2.289 Dok. Izin	1.708 Dok. Izin	1.877 Dok. Izin	124,98	1.900 Dok. Izin	145,75	
2	Jumlah jenis perizinan yang didelegasikan kepada BPPT Kota Gunungsitoli			27 jenis	27 jenis	27 jenis	29 jenis	-	-	27 jenis	-	-	32 jenis	-	53,64	10 jenis	62,73	Berdasarkan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 16 Tahun 2014i, ada 59 jenis perizinan yang didelegasikan kepada BPPT Kota Gunungsitoli. Adapun target higgs tahun 2016 adalah sebanyak 110 jenis perizinan. Kendala utama hal ini adalah minimnya jumlah regulasi/payung hukum mengenai perizinan yang telah ditetapkan.
3	Jumlah Kecamatan dalam rangka pelaksanaan pembinaan perizinan kepada masyarakat			-	-	6 Kec.	6 Kec.	6 Kec.	6 Kec.	-	6 Kec.	6 Kec.	6 Kec.	6 Kec.	100	6 Kec.	125	Pembinaan dilakukan melalui kegiatan Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan pelaksanaan Monitoring Perizinan yang melibatkan masyarakat di 6 Kecamatan
4	Jumlah aparatur PNS yang mengikuti kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas			8 Org	8 Org	8 Org	8 Org	8 Org	10 Org	3 Org	9 Org	11 Org	9 Org	12 Org	88	10 Org	108	
5	Jumlah peraturan/ketentuan di bidang perizinan			-	1 draft	1 draft	1 draft	1 draft	-	-	2 draft	1 draft	3 draft	1 draft	175	1 draft	200	- Tahun 2012 : Kepwal tentang Mekanisme Perizinan dan Kepban tentang - Tahun 2013 : Kepwal tentang SOP Pelayanan Perizinan - Tahun 2014 : Kepwal tentang Pendelegasian, Kepban tentang SP dan Kepban tentang Mekanisme Pengaduan - Tahun 2015 : Kepwal tentang Revisi SOP Pelayanan Perizinan - Target tahun 2016 : Kepban tentang Revisi SP
6	Jumlah Kecamatan dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan secara langsung			-	-	2 Kec.	2 Kec.	2 Kec.	2 Kec.	-	-	-	3 Kec.	4 Kec.	87,50	4 Kec.	137,50	
7	Jumlah jenis aplikasi pelayanan perizinan			3 jenis						3 jenis					100	-	100	Aplikasi pendukung pada BPPT Kota Gunungsitoli ada 3 jenis, yaitu aplikasi perizinan, aplikasi kearsipan dan website. Aplikasi tersebut dilakukan pengembangan sesuai kebutuhan.
8	Jumlah jenis media publikasi layanan perizinan			3 jenis						3 jenis					100	-	100	Layanan perizinan pada BPPT Kota Gunungsitoli dipublikasikan melalui 3 jenis media, yaitu brosur-brosur, website, dan media elektronik (radio).
9	Frekuensi pelaksanaan rapat koordinasi perizinan dan non perizinan dengan SKPD terkait			-	-	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	4 kali	4 kali	2 kali	300	1 kali	325	
10	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi perizinan			1 dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.	-	1 dok.	1 dok.	1 dok.	2 dok.	83,33	1 dok.	100	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tupoksi SKPD	SPM/ Standar Nasional	IKK (PP 6/2008)	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian					Capaian s.d 2015 (%)	Proyeksi 2016	Proyeksi Capaian s.d 2016 (%)	Catatan Analisis
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11	Jumlah dokumen laporan hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			-	-	1 dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.	-	-	2 dok.	2 dok.	2 dok.	150	2 dok.	200	Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka BPPT melakukan pengukuran IKM setiap Semester.

Gunungsitoli, April 2016

KEPALA-BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU KOTA GUNUNGSITOLI,



MEI LINDA ROSTANTI LAROSA, ST
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19690531 199503 2 003

Lampiran 3

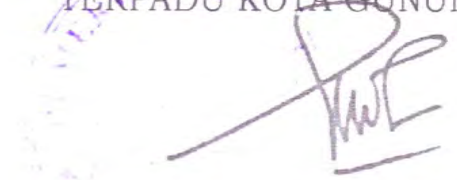
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI MASYARAKAT
KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017

SKPD : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

Gunungsitoli, April 2016

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU KOTA GUNUNGSITOLI,



MEI LINDA ROSTANTI LAROSA, ST
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19690531 199503 2 003

Lampiran 4.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, LOKASI, PAGU INDIKATIF DAN PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018

URUSAN : Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kependidikan dan Persandian

SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gunungsitoli

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		PAGU INDIKATIF (Rp)	PERKIRAAN MAU RENCANA TAHUN 2018	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET.
					TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Wajib										
		(P.IV). Bidang Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang didukung dengan sumber daya aparatur daerah yang memiliki etos kerja dan kapabilitas dalam menerapkan tata kelola pemerintah					BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA GUNUNGSITOLI		
Otda, Pem. Umum, Adm. Keuda, Prkt Daerah, Kepeg. dan Persandian										
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	945.000.000	992.250.000		
1	Penyediaan jasa surat menyurat			Gunungsitoli	Tersedianya materai, perangko dan benda pos lainnya	3 Jenis	6.000.000	6.300.000		
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Gunungsitoli	Tersedianya biaya rekening listrik, telepon, air dan internet	6 Jenis	134.000.000	140.700.000		
3	Pemeliharaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Gunungsitoli	Tersedianya biaya perizinan kendaraan dinas/operasional	1 Unit Mobil dan 4 Unit S. Motor	5.000.000	5.250.000		
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Gunungsitoli	Tersedianya upah tenaga petugas kebersihan	1 Orang	20.400.000	21.420.000		
5	Penyediaan alat tulis kantor			Gunungsitoli	Tersedianya biaya alat tulis kantor	90 Jenis	100.000.000	105.000.000		
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Gunungsitoli	Tersedianya biaya cetak, penggandaan dan fotocopy dokumen/surat-surat dinas	12 Jenis	90.140.000	94.647.000		
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Gunungsitoli	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor	12 Jenis	10.000.000	10.500.000		
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Gunungsitoli	Tersedianya buku bacaan, surat kabar/majalah dan buku peraturan perundang-undangan	2 Jenis	5.000.000	5.250.000		
9	Penyediaan makanan dan minuman			Gunungsitoli	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman aparatur, tamu dan rapat	1 Tahun	100.000.000	105.000.000		
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Luar Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah untuk mengikuti rapat-rapat koordinasi/konsultasi dan kegiatan lain	85 OH	160.000.000	168.000.000		
11	Monitoring/Survey/Pengawasan/Evaluasi Serta Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah			Gunungsitoli	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk mengikuti rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan kegiatan lain	500 OH	110.000.000	115.500.000		

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		PAGU INDIKATIF (Rp)	PERKIRAAN MAU RENCANA TAHUN 2018	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET.
					TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Penyediaan Jasa Administrasi Umum			Gunungsitoli	Tersedianya honorarium pengelola administrasi umum/ keuangan	14 Orang	93.160.000	97.818.000		
13	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor			Gunungsitoli	Tersedianya upah tenaga administrasi kantor	3 Orang	61.200.000	64.260.000		
14	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor			Gunungsitoli	Tersedianya upah tenaga petugas jaga malam	1 Orang	20.400.000	21.420.000		
15	Penyediaan Jasa Supir/Kernet/Operator Alat Berat			Gunungsitoli	Tersedianya upah tenaga supir	1 Orang	22.200.000	23.310.000		
16	Penyediaan peralatan kebersihan kantor			Gunungsitoli	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	20 Jenis	7.500.000	7.875.000		
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Gunungsitoli	Terpenuhi dan terpeliharanya sarana dan prasarana pelayanan perizinan	100%	170.000.000	178.500.000		
1	Pengadaan meubelair			Gunungsitoli	Tersedianya meubelair kantor	3 Jenis	20.000.000	21.000.000		
2	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor			Gunungsitoli	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	10 Jenis	50.000.000	52.500.000		
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional			Gunungsitoli	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik	1 Unit Mobil dan 4 Unit S. Motor	50.000.000	52.500.000		
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Gunungsitoli	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor dengan baik	12 Jenis	50.000.000	52.500.000		
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			Gunungsitoli	Meningkatnya disiplin aparatur pelayanan	100%	30.000.000	31.500.000		
1	Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)			Gunungsitoli	Tersedianya Pakaian Dinas Harian (PDH) pegawai	29 Stel	30.000.000	31.500.000		
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Gunungsitoli	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pelayanan	100%	100.000.000	105.000.000		
1	Mengikuti kegiatan Diklat/Bimtek/Workshop/ Kursus/Sosialisasi			Gunungsitoli / Luar Daerah	Tersedianya biaya mengikuti kegiatan Diklat/Bimtek/ Workshop/Kursus/Sosialisasi	50 OH	100.000.000	105.000.000		
V	Program Pelayanan Perizinan			Gunungsitoli	Meningkatnya pelayanan perizinan yang mudah, sederhana, cepat dan transparan	100%	495.000.000	519.750.000		
1	Publikasi Layanan Perizinan Melalui Media Elektronik			Gunungsitoli	Tersedianya biaya Publikasi Layanan Perizinan Melalui Media Elektronik	600 kali siar	20.000.000	21.000.000		
2	Rapat Koordinasi Pelayanan Perizinan			Gunungsitoli	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pelayanan Perizinan dengan SKPD terkait	4 kali	60.000.000	63.000.000		
3	Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Gunungsitoli	Tersusunnya Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2 Laporan	40.000.000	42.000.000		

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		PAGU INDIKATIF (Rp)	PERKIRAAN MAU RENCANA TAHUN 2018	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET.
					TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan			Gunungsitoli	Terselenggaranya Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	6 Kecamatan	100.000.000	105.000.000		
5	Penyusunan revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan			Gunungsitoli	Tersusunnya rancangan revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan	1 Draft	25.000.000	26.250.000		
6	Pelayanan perizinan secara langsung di Kecamatan			Gunungsitoli	Terselenggaranya pelayanan perizinan secara langsung di Kecamatan	4 Kecamatan	60.000.000	63.000.000		
7	Penanganan Pengaduan Perizinan			Gunungsitoli	Terlaksananya pengelolaan pengaduan masyarakat terkait pelayanan perizinan	12 Bulan	40.000.000	42.000.000		
8	Pembentukan Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan			Gunungsitoli	Tersedianya honorarium Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	50 Orang	150.000.000	157.500.000		
VI	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah			Gunungsitoli	Adanya pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	100%	60.000.000	63.000.000		
1	Pembuatan brosur perizinan			Gunungsitoli	Tersedianya brosur perizinan	1 Paket	20.000.000	21.000.000		
2	Pembuatan kalender perizinan			Gunungsitoli	Tersedianya kalender perizinan	1 Paket	15.000.000	15.750.000		
3	Pengembangan website			Gunungsitoli	Terlaksananya pengembangan website SKPD	1 Paket	25.000.000	26.250.000		
J U M L A H							1.800.000.000	1.890.000.000		

Gunungsitoli, April 2016

KEPALA ~~BADAN~~ PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU KOTA GUNUNGSITOLI,


MEI LINDA ROSTANTI LAROSA, ST
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19690531 199503 2 003